

#BATS-PAPER.VOL.10



INSENTIF PAJAK SEBAGAI MAGNET INVESTASI IKN

“A CUP OF COFFEE WITH A
GOOD BATS PAPER IS A
PERFECT COMBINATION
TO ACCOMPANY
YOUR WEEKEND”



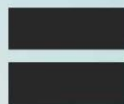
CAPPUCINO



OATMEAL



READ THE BEST BATS PAPER:
INSENTIF PAJAK SEBAGAI MAGNET
INVESTASI IKN



IT'S A PERFECT COMBINATION

ENJOY YOUR WEEKEND :)

IKN Harapan Indonesia Maju 2045 : Studi Komparasi Strategi Pengembangan Wilayah Beberapa Negara

Pemerintah Indonesia tidak main-main tentang niat awalnya untuk memindahkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Terbukti, saat ini sebuah wilayah di Kalimantan Timur disiapkan untuk Ibu Kota baru bagi Indonesia yang dinamakan sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN). Relokasi ibu kota negara mungkin tampak sebagai kebijakan yang tak biasa, namun nyatanya bukan hal asing dalam sejarah. Beberapa negara memilih melakukan relokasi ibu kota mereka dengan alasan mengatasi masalah di ibu kota sebelumnya, pemerataan, penguatan identitas bangsa, serta isu politik/pertahanan. Nigeria membangun ibu kota baru untuk menekankan persatuan negara yang beragam. Sedang Brazilia dibangun sebagai ibu kota Brazil yang baru dengan visi memajukan potensi kawasan pedalaman.



Indonesia sendiri membangun ibu kota barunya dengan pemerataan sebagai alasan utama. Pemerintah Indonesia ingin mengurangi beban pemusatan penduduk dan perekonomian yang membuat Jawa khususnya jantung kota Jakarta begitu padat, digeser ke wilayah yang lebih lapang, bersih dan relatif aman.

Selain itu, pemerintah menginginkan pusat negara yang dibuatannya sendiri dengan mengusung pendekatan Indonesia-sentris, yang mencerminkan suatu identitas bersama dalam keberagaman, bukan 'lungsuran' penjajah.

Lantas, apakah IKN cukup mampu untuk mewujudkan kemajuan bangsa dimasa mendatang?

Pertanyaan yang sama dilontarkan publik kepada setiap negara yang merelokasi ibu kota negaranya ke wilayah yang baru, yakni perihal apakah relokasi tersebut berdampak signifikan bagi kemajuan bangsa dimasa mendatang. Setidaknya, 13 negara tercatat melakukan merelokasi ibu kota negaranya.

Negara	Tahun	Ibu Kota Baru	Ibu Kota Lama
Brazil	1956	Brasilia	Rio de Janeiro
Mauritania	1957	Nouakchott	Saint Louis
Pakistan	1959	Islamabad	Karachi
Botswana	1961	Gaborone	Mafeking
Libya	1963	Tripologi	Benghazi
Malawi	1965	Liliongwe	Zomba
Belize	1970	Belmopan	Belize City
Tanzania	1973	Dodoma	Dar es Salaam
Nigeria	1975	Abuja	Lagos
Pantai Gading	1983	Yamoussoukro	Abidjan
Jerman	1990	Berlin	Bonn
Kazakhstan	1997	Astana	Almaty
Malaysia	1999	Putrajaya	Kuala Lumpur

Dari negara-negara tersebut, terdapat beberapa negara yang diklaim dapat dijadikan acuan bagi Indonesia untuk membangun IKN yang berkelanjutan.

1. Abuja, Nigeria

Abuja dipilih sebagai Ibu Kota Nigeria sejak 1991, dengan letaknya yang strategis, lahan hijau yang luas, iklim yang sejuk, dan penduduk yang sangat sedikit. Pemerintah berkeinginan mengurangi kesenjangan di Nigeria. Meski Lagos tetap menjadi kota terpadat, namun distribusi penduduk ke Abuja cukup signifikan dengan digesernya pusat negara ke Abuja. Dari segi demografi, Abuja dilaporkan memiliki pertumbuhan tercepat di penjuru Afrika dan salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Dalam rentang waktu 10 tahun sejak didapuk menjadi ibu kota, terjadi peningkatan jumlah penduduk mencapai 140% di Abuja.

Kota Abuja diklaim menjadi salah satu kota terencana yang sukses dikembangkan di Afrika. Meski pusat komersial Nigeria masih terletak di Lagos, namun potensi pengembangan ekonomi Abuja sangat besar. Dari segi sosial budaya, Abuja berkembang dengan landasan persatuan suku, agama, dan kelompok etnis yang tinggal di Nigeria. Abuja dirancang untuk menjadi kota yang aman dan damai bagi populasi penduduknya yang beragam dibandingkan kota lain yang masih rawan dengan isu kekerasan.

2. Brasilia, Brazil

Pembangunan Brasilia dilaksanakan di wilayah 'pedalaman' yang harus dimulai dari awal sejak tahun 1956 dan diresmikan pada 1960. Pembangunan ini diperkirakan memakan dana 2-3% PDB Brazil saat itu, suatu angka pengeluaran yang cukup besar untuk dipulihkan bagi negara berkembang seperti Brazil. Brasilia dikembangkan dengan skema pembiayaan

tradisional, yakni melalui anggaran pemerintah dengan cara pencetakan mata uang dan pinjaman, baik ke pihak swasta maupun ke luar negeri.

Pembangunan Brazilia turut mengembangkan aktivitas ekonomi dan pariwisata sehingga wilayah pedesaan dapat mengejar ketertinggalan. Disamping itu, pemerintah juga berupaya mendistribusikan penduduk dari wilayah yang padat sehingga tercipta pemerataan baik dalam skala ekonomi maupun demografi. Terbukti, dalam 10 tahun pertama setelah relokasi, pertumbuhan penduduk Brazilia mencapai 14,4%, jauh dibandingkan Rio De Janeiro yang hanya 4,2%.

Efektifitas Brazilia terlihat dari kontribusinya terhadap ekonomi nasional. Brazilia mengalami peningkatan signifikan atas populasi, lapangan pekerjaan, dan sumbangannya pada PDB pasca ditetapkan sebagai ibu kota. Pada 2019 dilaporkan wilayah ibu kota baru Brazil ini tercatat memiliki pendapatan per kapita tertinggi di Brazil. *Multiplier effect* pemindahan ibu kota nampaknya cukup mengagumkan. Indeks *output multiplier* tercatat diangka 2,93 sementara indeks *employment multiplier* berada di angka 1,7 pekerjaan privat diciptakan untuk setiap tambahan pekerjaan sektor publik. Meski demikian, Rio de Janeiro tidak mengalami penurunan ekonomi yang signifikan. Hal lain yang dapat dipelajari dari Brazilia adalah keputusan membuat ruang tetap hijau. Brazilia dibangun dengan konsep pengembangan kota yang hijau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

3. Putrajaya, Malaysia

Malaysia meresmikan Putrajaya sebagai Ibu Kota Negara barunya pada Tahun 1999. Alih-alih memindahkan ibu kotanya secara total, Malaysia hanya mengalihkan fungsi administrasinya ke Putrajaya. Program Vision 2020 yang dicanangkan pemerintahan Malaysia menargetkan Negeri Jiran sebagai negara maju sepenuhnya pada 2020, merancang pembangunan Putrajaya sebagai kiblat pembangunan kota khususnya untuk negara Asia Tenggara.

Perekonomian negara di klaim cukup kokoh untuk mendanai proyek relokasi pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya yang dimulai pada tahun 1995. Saat itu Malaysia memiliki cadangan produksi besar dari hasil minyak. Komitmen yang kuat dari pihak otoritas atas pembangunan proyek Ibu Kota Negara, membuat pelaksanaan relokasi ini tidak memiliki kendala berarti.

Pembangunan Putrajaya sebagai pusat administrasi pemerintah dilakukan pemerintah melalui skema *Public Private Partnership*, menggandeng Putrajaya Holdings Sdn Bhd sebagai pengembang utama dan Kuala Lumpur City Center Bhd sebagai pengelola proyek. Putrajaya Holdings Sdn Bhd memakan anggaran sekitar 10% PDB Malaysia. Walaupun mendapat kritik keras dari pihak oposisi, nyatanya pemindahan ini tetap dilakukan.

Dari sisi budaya, Pemerintah Malaysia memperkenalkan identitas Putrajaya sebagai kota maju bernuansa islam. Hal ini tampak dari konsep arsitektur modern bernuansa islami

yang dibangun pada pembangunan wilayah Putrajaya. Budaya islami dikembangkan untuk memperkenalkan Malaysia sebagai salah satu negara muslim maju. Putrajaya juga menargetkan angka kriminalitas daerahnya hingga mendekati 0.

Berkaca dari pengalaman beberapa negara yang membangun ulang ibu kotanya, terdapat beberapa faktor yang menjadikan berhasilnya suatu negara merelokasi ibu kota mereka.

Pertama adalah kekuatan pembiayaan atau anggaran negara. Brazil mengusung ibu kota baru sejak 1890-an, namun baru terlaksana setengah abad kemudian. Pengeluaran pembangunan hingga 3% dari PDB Brazil membuat pemulihan memakan biaya yang lama. Berbeda dengan Malaysia yang saat itu memiliki kekuatan dari hasil minyak untuk menopang pundi-pundi anggarannya. Skema pendanaan yang digunakan Malaysia yakni *Privat Public Partnership* pun lebih meringankan anggaran negara. Kazakstan pun demikian, pembangunan Ibu Kota Astana dibiayai dari hasil swasta dan investasi hampir sebesar 50%.

Kedua, faktor keberlanjutan dalam hal komitmen kebijakan. Pembangunan ibu kota baru memerlukan jangka waktu yang tidak sebentar. Komitmen untuk melaksanakan kebijakan secara terstruktur dan adaptif tentu menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu negara merelokasi ibu kotanya. Apabila tampuk kepemimpinan berganti dengan komitmen pembangunan yang berbeda dengan pemimpin sebelumnya, maka ibu kota yang dirancang pun tak dapat diwujudkan sesuai *road map*.

Ketiga, adalah faktor sosial budaya. Nigeria berhasil membangun Abuja sebagai tempat tinggal yang aman bagi masyarakatnya yang beragam, baik secara suku, agama, dan kelompok etnis. Pembangunan pemukiman baru untuk transmigran perlu ditata dan dikelola untuk memastikan warga lokal tetap memperoleh haknya dengan kedatangan penduduk baru. Dengan demikian, potensi terjadinya konflik sosial antar suku, agama, ras, dan etnis dapat dikelola.

Keempat, adalah faktor tata ruang dalam kota. Brazilia, sebagai kota yang identik dengan dengan hutan Amazonnya merupakan wilayah paru-paru bagi Brazil. Pindahannya ibu kota ke Brazilia bukan berarti membuat peran tersebut hilang. Lebih dari 50% ruang terbuka hijau disediakan dalam desain tata kota Brazilia yang mengusung konsep pembangunan *green city*.

Kelima adalah *partnership* dengan pihak pengembang dan pebisnis. Untuk menghidupkan suatu kota, pemerintah tidak cukup dengan memindahkan pusat pemerintahannya tanpa mengembangkan fasilitas pendukung. Pemerintah perlu memiliki proyeksi pembangunan sehingga dapat diprediksi laju distribusi penduduk dengan kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas dan sarana prasarana tersebut meliputi pemukiman, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor perekonomian, moda transportasi, dan pariwisata.

Insentif Pajak Sebagai Magnet Investasi

Segi lain yang cukup menarik untuk merintis pembangunan suatu kawasan baru adalah berbagai insentif dan keramahan aturan bagi bisnis yang dirintis didalamnya. Tak dipungkiri, meski *tax factor* bukan garda utama penentu berinvestasi, namun insentif pajak tetap memiliki daya tarik tersendiri bagi para penanam modal. Menilik pengalaman bagaimana beberapa negara berdiri, insentif pajak cukup menjadi salah satu instrumen yang patut ditawarkan dalam keadaan keterbatasan modal dan sumber daya manusia.

Berkaca pada perkembangan pembangunan di China misalnya. Pemanfaatan insentif pajak China untuk menarik investasi asing dan mendukung pembangunan ekonominya telah menjadi komponen kunci dari strategi pertumbuhannya sejak awal reformasi ekonominya pada akhir 1970-an. *Tax incentive* dan *investment allowance* memainkan peran penting dalam menarik *foreign direct investment* (FDI), dan teknologi, serta membantu transisi negara tirai bambu tersebut dapat *settle* seperti saat ini.

China sempat menyediakan tarif PPh Badan lebih rendah bagi investor asing dibandingkan tarif standar yang berlaku untuk perusahaan domestik. Di sektor dan wilayah geografis tertentu, perusahaan asing dapat menikmati pembebasan PPh Badan sepenuhnya pada tahun pertama, diskon tarif hingga 50% lebih rendah disediakan untuk tahun kedua dan ketiga, serta pengurangan tarif 15%-30% lebih rendah pada tahun-tahun berikutnya selama 10 tahun atau lebih.

Insentif lain untuk mengerek modal dan teknologi, China menawarkan insentif pajak yang cukup menguntungkan kepada Perusahaan asing yang tergolong industri berteknologi tinggi dan berorientasi ekspor. Hal ini dilakukan guna menarik teknologi maju sekaligus mempromosikan ekspor.

Sedang untuk sharing teknologi dan pengetahuan, China menyediakan insentif termasuk insentif pajak bagi Perusahaan asing yang melakukan *Joint Venture* dengan bisnis lokal. Struktur investasi ini memungkinkan perusahaan asing untuk bermitra dengan entitas lokal.

Kombinasi berbagai insentif pajak dibarengi reformasi dan kebijakan ekonomi lainnya, mendorong lonjakan investasi asing ke China. Seiring waktu, ketika ekonomi China berkembang, beberapa dari insentif disesuaikan secara bertahap sesuai kebutuhan dan prioritas negara. Namun, warisan penggunaan insentif pajak untuk menarik investasi asing tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi Pembangunan China.

Hal serupa dilakukan Singapura sejak masa awal kemerdekaannya. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, Singapura menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, termasuk kurangnya sumber daya alam, tingginya angka pengangguran, dan terbatasnya pembangunan

industri. Pemerintah Singapura menerapkan serangkaian promosi insentif pajak untuk menarik investasi asing dalam hal kontribusi modal, peningkatan lapangan kerja dan promosi industri baru, serta pengembangan keterampilan dan teknologi yang berperan dalam mendorong transformasi Singapura menjadi negara yang berkembang pesat.

Singapura memiliki kebijakan pengecualian pajak bagi industri-industri baru yang dianggap penting bagi pembangunan ekonomi Singapura selama periode tertentu. Singapura juga memberikan pengecualian dan pengurangan pajak kepada industri yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dalam hal mendorong inovasi dan penelitian, Singapura memberikan insentif bagi kegiatan litbang. Diskon pajak dan tunjangan di gelontorkan pemerintah bagi perusahaan yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.

Sedang untuk mendorong perusahaan multinasional agar mendirikan kantor pusat regional di Singapura, pemerintah memperkenalkan insentif pajak, termasuk pengurangan tarif pajak penghasilan atas dividen dan bunga untuk perusahaan non-residen. Ditambah lagi, Singapura memiliki kebijakan insentif pembebasan pajak bagi reinvestasi keuntungan yang diperoleh dari bisnis luar negeri ke Singapura. Keuntungan dari aktivitas perdagangan internasional tertentu yang melibatkan bisnis lokal juga dipertimbangkan untuk mendapat guyuran insentif pajak dari pemerintah.

Dari segi upaya mendorong ekspor, Singapura mendirikan zona khusus sebagai tempat bagi entitas bisnis menikmati pembebasan pajak dan insentif lain untuk memproduksi barang-barang yang diprioritaskan untuk pasar ekspor. Strategi ini membantu meningkatkan sektor manufaktur Singapura dan mendorong pertumbuhan berorientasi ekspor.

Penggunaan strategis dari insentif pajak ini, dipadukan dengan tata kelola yang efektif, pembangunan infrastruktur, dan investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, membantu Singapura mengatasi tantangan awal perekonomiannya dan menjadi kekuatan ekonomi global.

Bagaimana dengan Strategi Pemerintah untuk Pembangunan IKN ?

Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi setaraf Undang-Undang, yaitu UU Nomor 3 Tahun 2022 untuk dijadikan payung hukum bagi pembangunan IKN. Melalui regulasi tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa ibu kota yang dibangunnya menuai hasil perbaikan, pemerataan, kemajuan, dan persatuan.

Dari segi pembiayaan agenda mega proyek relokasi ibu kota, pilihan yang tepat dari pemerintah Indonesia untuk menekan proporsi pembiayaan hanya 20% dari total estimasi

pendanaan atau setara dengan kisaran 1% dari PDB 2022. Apabila laju ekonomi nasional terkendali, pengeluaran yang merogoh APBN tersebut cukup mudah dipulihkan.



Dari segi tata kota, pemerintah menginginkan konsep pembangunan *green city* dan *forest city*, yang adaptif dengan kondisi alam. Pembangunan fasilitas umum berdasarkan energi ramah lingkungan diprioritaskan. Fasilitas pajak bagi pengembangan energi hijau disediakan guna mendukung ibu kota bebas polutan. Konservasi satwa dan persemian lingkungan untuk menata kota hijau digalakkan untuk mengimbangi pembukaan lahan.

Dari sisi sosial budaya, pembangunan kota diarahkan menjadi lingkungan kota yang aman, terjangkau, serta kesetaraan bagi masyarakatnya yang beragam. Kota yang asri dan ramah bagi pedestrian juga akan menjadi identitas ibu kota baru tersebut.

Dari segi iptek, konsep *smart city* digerakkan untuk menjadi kota yang nyaman, efisien, dan aktif menghadapi masa depan. Aktivitas penelitian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (R&D) juga dihargai mahal berupa fasilitas pengurangan penghasilan. Pengembangan SDM dan iptek diharapkan berkembang dengan fasilitas fiskal ini. Guna mempercepat pembangunan secara keseluruhan, regulasi lain disusun untuk memberikan kemudahan perizinan dan berusaha bagi pelaku usaha di IKN serta fasilitas untuk menjaring modal, tenaga kerja, serta pengembangan iptek.

Sebagai daya pikat investasi, fasilitas modal telah dipersiapkan pemerintah bagi entitas dan pekerja yang merintis pekerjaan dan usaha di IKN. Pemerintah menawarkan berbagai insentif fiskal maupun non fiskal sebagai daya pikat investasi IKN dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Fasilitas modal ini diperuntukkan baik bagi penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.

Untuk insentif IKN, Pemerintah pusat menyediakan insentif pajak penghasilan, PPN dan/atau PPnBM, serta fasilitas Kepabeanan. Sedangkan Otorita IKN memberikan insentif berupa fasilitas penyediaan lahan dan sarana prasarana bagi pelaksana kegiatan penanaman modal di IKN. Pemberian berbagai fasilitas tersebut diberikan melalui sistem OSS atau saluran elektronik yang disediakan. Berikut fasilitas pajak yang diberikan pemerintah di IKN.

1. Pajak penghasilan

Pemerintah pusat telah menetapkan sembilan fasilitas pajak penghasilan bagi berbagai lapisan wajib pajak di IKN.

Pertama, pengurangan PPh Badan bagi Wajib Badan Dalam Negeri. Badan Dalam Negeri yang menanamkan modal di IKN ataupun daerah mitra IKN minimal 10 Miliar dalam bentuk infrastruktur dan layanan umum, fasilitas bangkitan ekonomi, dan usaha tertentu yang tergolong strategis untuk Pembangunan akan memperoleh pengurangan PPh Badan mulai 50% - 100%. Fasilitas ini dapat diberikan selama 10 hingga 30 tahun, berdasarkan tahun dimana investasi mulai direalisasikan.

Kedua, fasilitas PPh bagi usaha sektor keuangan, seperti perbankan, perasuransian, dan keuangan syariah. Penanaman modal untuk sektor keuangan berkesempatan menikmati fasilitas pengurangan PPh Badan penuh atas bagian penghasilan untuk investasi atau membiayai pembangunan, pengembangan, dan kegiatan ekonomi. Fasilitas pajak ini dapat dinikmati sektor keuangan selama 20 - 25 tahun.

Ketiga, pengurangan PPh Badan atas pendirian ataupun pemindahan kantor pusat/regional di IKN. Fasilitas pajak ini berlaku baik bagi Pelaku usaha asing maupun wajib pajak domestik yang memindahkan atau mendirikan kantor di IKN, yang diberikan dalam bentuk pengurangan PPh Badan. untuk membantu *cash flow* pelaku usaha yang memindahkan atau membangun kantor usaha di IKN, pengurangan PPh Badan 100% akan diberikan selama 10 tahun pajak dan pengurangan 50% untuk 10 tahun berikutnya.

Keempat, pengurangan penghasilan bruto untuk penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu. Kelima, Pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu. Pengurangan PPh Badan dapat diberikan hingga 250% untuk penyelenggaraan pengembangan SDM dan Pengurangan penghasilan bruto hingga 350% untuk kegiatan litbang. Langkah ini diambil untuk mempercepat peningkatan SDM dan inovasi bisnis di IKN.

Keenam, pengurangan penghasilan bruto atas sumbangan dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba. Tak dipungkiri jika pemerataan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk menunjang keberhasilan Pembangunan IKN. Oleh karena itu, pemerintah siap menyediakan pengurangan penghasilan bruto hingga 200% dari jumlah sumbangan dalam rangka pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba.

Ketujuh, Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final. Dalam hal menarik tenaga kerja, insentif DTP pun disediakan. Bagi pegawai orang pribadi yang

mengabdikan diri di IKN akan memperoleh fasilitas pemotongan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) atas penghasilannya yang diperoleh dari wilayah IKN dan dari pemberi kerja yang tinggal di wilayah IKN.

Kedelapan, Pajak Penghasilan final 0% (nol persen) atas penghasilan dari peredaran bruto usaha tertentu UMKM, dalam jangka waktu tertentu. Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut dikenakan atas penghasilan dari peredaran bruto sampai dengan Rp50 Miliar dalam 1 tahun pajak yang diterima atau diperoleh pada lokasi usaha yang berada di IKN. Jangka waktu fasilitas diberikan hingga tahun 2035.

Kesembilan, pengurangan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Fasilitas pengurangan PPh secara penuh diberikan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pembeli yang merupakan perolehan pertama melalui SKB (Surat Keterangan Bebas). Hal ini ditujukan untuk menunjang kemudahan dalam memiliki hak guna/hak pakai ataupun pengalihan tanah/bangunan, sehingga *cost administration* pra-pembangunan bisa ditekan.

2. Fasilitas PPN dan/atau PPnBM

Tak hanya PPh, Fasilitas PPN dan/atau PPnBM juga disiapkan untuk menunjang percepatan pengadaan barang di IKN. Dari sisi pengadaan dan peredaran barang/jasa, impor ataupun penyerahan tertentu dapat memperoleh fasilitas PPN, termasuk pengadaan mesin dan bahan yang menunjang dunia industri. Pembebasan pajak impor untuk pengadaan barang yang minim diproduksi di dalam negeri juga telah dijamin.

PPN tidak dipungut diberikan atas penyerahan barang/jasa yang bersifat strategis. Impor Impor oleh dan/atau Penyerahan kepada PKP yang menghasilkan listrik tenaga energi baru dan terbarukan berupa mesin dan peralatan pabrik, baik mesin/peralatan utama maupun pendukung untuk menghasilkan listrik tenaga energi baru dan terbarukan di IKN juga tidak akan dipungut PPN. Jasa konstruksi Pembangunan tertentu juga tidak akan dipungut PPN. Selain itu, untuk penyerahan kelompok hunian mewah kepada orang pribadi, Badan, ataupun Kementerian/Lembaga, yang berkegiatan usaha, bertugas, atau berkedudukan di IKN akan dikecualikan dari PPnBM. Fasilitas ini akan diberikan hingga tahun 2035.

3. Fasilitas Kepabeanan

Pemerintah terlihat jeli untuk memastikan pembangunan sarana dan prasarana serta pengembangan industri di IKN tidak terhambat pengadaan dan penyerahan bahan dan barang modal. Insentif dari kepabeanan akan menunjang proses pengadaan barang melalui fasilitas impor pembebasan bea masuk dan fasilitas PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor). Impor barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri di Daerah Mitra juga dapat memperoleh pembebasan bea masuk.

Impor barang oleh Pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan umum serta Impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri akan diberikan kenikmatan pembebasan Bea Masuk dan Fasilitas PDRI hingga 2045. Barang modal tersebut mencakup mesin, permesinan, perlengkapan instalasi pabrik, peralatan, atau perkakas lain. Sedangkan barang bahan mencakup semua barang atau bahan, yang digunakan sebagai bahan atau komponen menghasilkan barang jadi tanpa melihat jenis dan komposisi barang dan bahan yang diimpor.

Fasilitas diberikan sepanjang belum diproduksi di dalam negeri atau sudah diproduksi namun tidak memenuhi spesifikasi atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri. Pembebasan bea masuk diberikan terhadap barang modal, barang dan bahan yang berasal dari Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus, dan/atau Penimbunan Berikat.

Selain insentif pajak yang diberikan pemerintah pusat, Otorita IKN sebagai pemerintah wilayah IKN juga berwenang menambahkan insentif lain bagi penanam modal IKN. Otorita IKN dapat menyediakan insentif berbentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak khusus IKN serta insentif berbentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan penerimaan khusus IKN. Pemberian Fasilitas Penanaman Modal dilakukan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Kepala Otorita IKN.

Dengan segala strategi tersebut, nampak perhatian pemerintah akan setiap detail aspek pembangunan masyarakat dan infrastruktur IKN. Mulai dari kemudahan usaha, pengadaan bahan, barang modal, kemudahan usaha bagi investor, hingga pemenuhan tenaga kerja, menunjukkan keseriusannya untuk mempersiapkan Indonesia Maju pada usia seabad kemerdekaan RI.

Ibu kota baru memang dirancang sebagai *milestone* transformasi besar bagi Indonesia, yang diharapkan dapat dikenal sebagai simbol yang baru serta membawa *multiplier effect* yang akan pemeratakan laju pertumbuhan. *Progress* pembangunan IKN ditujukan untuk membuka peluang dan potensi pemerataan ekonomi, mendorong laju pertumbuhan, memperluas lapangan kerja, hingga diharapkan menekan angka kemiskinan. Akhirnya, dari IKN, Indonesia dapat mengalami pertumbuhan yang makin merata khususnya bagi pembangunan di luar Jawa guna mendukung pembangunan menuju Indonesia Maju 2045.



**BRIAN PRAMUDITA S.E., Ak., M.Ak., CA,
CPA., BKP., CIB., CCA**

Managing Partner - BATS Consulting

- ◆ Chartered Accountant
- ◆ Certified Public Accountant
- ◆ Register Tax Consultant
- ◆ Certified Investment Banker
- ◆ Certified Carbon Auditor

☎ +62 816-1105-174

✉ brianpramudita@bats-consulting.com

CONTACT US

FIND US!



Office : +6221 2212 9136
Mobile : +62882 9022 2512
(Giordano)

Email
info@bats-consulting.com



**Join Our Forum Group
Discussion Taxation!**
And Free Consultation